

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tabel Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti	Judul	Metode	Hasil
1	Mia Ermawati dan Ema Umilia	Arahan Penataan Lingkungan Kawasan Perumahan Swadaya di Kelurahan Tambak Wedi Kota Surabaya	Metode Analisa	Penataan perumahan melalui rehabilitasi bangunan khusus bangunan semi permanen dan pembangunan hunian vertikal berupa rumah susun bagi wilayah perumahan dengan kepadatan yang sangat tinggi
2	Jawas Dwijo Putro	Penataan Kawasan Kumuh Pinggiran Sungai di Kecamatan Sungai Raya	Metode Primer	Pemukiman perkotaan di arahkan penyediaan air bersih melalui jaringan pipa PDAM dengan memanfaatkan air baku dari sungai/air permukaan
3	Helyanto, Gusti Zulkifli Mulki dan Marsudi	Kajian Penataan Perumahan Dan Permukiman Tepian Sungai Kapuas di Kota Pontianak	Metode Penelitian Data Primer dan Data Sekunder dan Teknik Analisis	Penataan Permukiman yang meliputi penataan massa dan tampilan bangunan bertumpu kepada sungai

sumber: <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=penataan+lingkungan>

2.2 Kawasan Permukiman

2.2.1 Fungsi Utama kawasan Permukiman

Sebagai lingkungan tempat tinggal dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan masyarakat sekaligus menciptakan interaksi sosial. Perumahan sebagai bagian dari permukiman berfungsi sebagai kumpulan tempat hunian dan tempat berteduh keluarga serta sarana bagi pembinaan keluarga.

2.2.2 Kriteria Umum dan Norma-Norma Pemanfaatan

1. Ketentuan pokok tentang perumahan, permukiman, peran serta masyarakat dan pembinaan perumahan dan permukiman nasional mengacu pada Undang-Undang nomor 4 tahun 1992 tentang perumahan dan permukiman dan Surat Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 217/KPTS/M/2002 tentang Kebijakan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman (KSNPP).
2. Pemanfaatan ruang untuk kawasan permukiman harus sesuai dengan daya dukung tanah setempat dan harus dapat menyediakan lingkungan yang sehat dan aman dari bencana alam serta dapat memberikan lingkungan hidup yang sesuai bagi pengembangan masyarakat, dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup yang sesuai bagi pengembangan masyarakat, dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
3. Kawasan permukiman harus memiliki prasarana jalan dan terjangkau oleh sarana transportasi umum.
4. Pemanfaatan dan pengelolaan kawasan permukiman harus didukung oleh ketersediaan fasilitas fisik atau fasilitas umum (pasar, pusat perdagangan dan jasa, perkantoran, sarana air bersih, persampahan, penanganan limbah dan drainase) dan fasilitas sosial (kesehatan, pendidikan, agama).
5. Dalam hal kawasan siap bangun (kasiba) dan lingkungan siap bangun (lisiba), penetapan lokasi dan penyediaan tanah: penyelenggaraan pengelolaan: dan pembinaannya diatur dalam peraturan pemerintahan

nomor 80 tahun 1999 tentang kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun yang berdiri sendiri.

6. Tidak mengganggu fungsi lindung yang ada.
7. Tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam.

2.3 Kawasan Permukiman dan Jasa

2.3.1 Fungsi Utama Kawasan Permukiman dan Jasa

Untuk memfasilitasi kegiatan transaksi permukiman dan jasa antara masyarakat yang membutuhkan (sisi permintaan) dan masyarakat yang menjual jasa (isi penawaran). Kegiatan perdagangan dan jasa cenderung lebih banyak menyerap tenaga kerja di perkantoran dan kontribusi terhadap PDRB umumnya cukup dominan.

2.3.2 Kriteria Umum dan Norma-Norma Pemanfaatan

1. Peletakan pembangunan dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung disesuaikan dengan kebutuhan konsumen.
2. Jenis-jenis bangunan yang diperbolehkan antara lain:
 - a. Bangunan usaha perdagangan (eceran dan grosir) : toko,warung,tempat perkulakan,pertokoan, dan sebagainya;
 - b. Bangunan penginapan : Hotel, guest house,hostel,motel, dan penginapan;
 - c. Bangunan penyimpanan dan pergudangan:gedung tempat parkir,ruang pameran, gudang;
 - d. Bangunan tempat pertemuan : aula, tempat konferensi; dan

- e. Bangunan pariwisata/rekreasi (di ruang tertutup); bioskop, area bermain.
3. Pemanfaatan ruang di kawasan perdagangan dan jasa harus diperuntukan untuk besar-besarnya kemakmuran rakyat, dengan tetap memelihara sumber daya tersebut sebagian cadangan pembangunan yang berkelanjutan dan tetap memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian fungsi lingkungan.

2.4 Fasilitas Penunjang

2.4.1 Fasilitas Sosial

1. Fungsi utama fasilitas sosial:

Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kualitas kehidupan yang layak. Fasilitas sosial merupakan fungsi penunjang bagi kegiatan beberapa kawasan budidaya menimbulkan bangkit aktivitas pelayanan ini dengan melayani kebutuhan sosial masyarakat. Jenis pelayanan kepada masyarakat mencakup pelayanan pendidikan, kesehatan, pelayanan umum, rekreasi dan kebudayaan, pembelanjaan dan niaga, peribadahan, olahraga dan ruang terbuka hijau.

2. Kriteria umum fasilitas sosial:

- a. Penetapan dan pendistribusian fasilitas sosial dan kawasan perkotaan perdesaan harus mempertimbangkan jumlah penduduk, kepadatan penduduk, perkembangan penduduk, status sosial

ekonomi masyarakat, nilai-nilai potensi masyarakat, dan pola kebudayaan penduduk.

- b. Penetapan dan pendistribusian fasilitas harus memperhatikan faktor lingkungan, terutama berkaitan dengan pertimbangan mengenai skala pelayanan, letak geografis lingkungan, sifat keterpusatan fasilitas sosial.
- c. Pengembangan fasilitas sosial dalam kawasan perkotaan dan pedesaan harus ditempatkan pada lokasi yang tepat agar mudah terjangkau dan mempunyai manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.
- d. Perkembangan fasilitas sosial dalam kawasan perkotaan dan pedesaan harus memperhatikan asas pemerataan pelayanan. Fasilitas sosial hendaknya dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat.
- e. Pengembangan fasilitas sosial harus mendukung upaya pengembangan kota dalam kerangka pengembangan sistem perkotaan yang secara hirarkis dapat menjadi pesat-pesat pengembangan wilayah.
- f. Pengembangan fasilitas sosial dalam kawasan perkotaan dan pedesaan harus memperhatikan asas pemenuhan kebutuhan. Fasilitas sosial harus dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi masyarakat dengan standar jumlah penduduk pendukung untuk

setiap fasilitas sosial tersebut yang disesuaikan dengan karakteristik kota.

- g. Pada kawasan peruntukan industri, pemanfaatan lahan untuk fasilitas sosial berkisar maksimal 10% dari luas lahan. Fasilitas sosial harus tersedia meliputi fasilitas kesehatan, peribadatan, rekreasi dan olahraga, ruang terbuka hijau.
- h. Pada kawasan permukiman, pemanfaatan lahan untuk fasilitas sosial berkisar maksimal 10% dari luas lahan. Fasilitas sosial yang harus tersedia meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, olahraga dan ruang terbuka hijau.
- i. Pada kawasan pariwisata, fasilitas sosial yang harus tersedia meliputi fasilitas kesehatan, rekreasi, peribadatan, dan ruang terbuka hijau.

2.4.2 Fasilitas Umum

1. Fungsi utama fasilitas umum

Penyediaan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kualitas kehidupan yang layak. Fasilitas umum merupakan fungsi penunjang bagi kegiatan beberapa kawasan budidaya mencakup fasilitas tempat pembuangan sampah, dan fasilitas terminal.

2. Kriteria umum fasilitas umum :

- a. Penyediaan fasilitas umum dalam suatu kawasan perkotaan dan perdesaan harus mempertimbangkan jumlah penduduk, dan status sosial ekonomi masyarakat.
- b. Penyediaan fasilitas umum dalam suatu kawasan perkotaan dan perdesaan harus memperhatikan faktor lingkungan terutama berkaitan dengan pertimbangan mengenai skala pelayanan, letak geografis lingkungan, sifat keterpusatan fasilitas umum.
- c. Pengembangan fasilitas umum dalam kawasan perkotaan dan perdesaan harus mempunyai manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.
- d. Pengembangan fasilitas umum dalam kawasan perkotaan dan perdesaan harus memperhatikan asas pemerataan pelayanan. Fasilitas fisik hendaknya dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat.
- e. Pengembangan fasilitas umum diharapkan dapat mendukung upaya pengembangan kota dalam kerangka pengembangan sistem perkotaan yang secara hirarkis dapat menjadi pusat-pusat pengembangan wilayah.
- f. Pengembangan fasilitas umum dalam kawasan perkotaan dan perdesaan harus memperhatikan asas pemenuhan kebutuhan. Fasilitas umum dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi masyarakat dengan standar jumlah penduduk pendukung untuk

setiap fasilitas fisik tersebut yang disesuaikan dengan karakteristik kota.

- g. Pada kawasan peruntukan industri pemanfaatan untuk fasilitas umum maksimal 12% dari luas lahan. Fasilitas fisik harus tersedia meliputi jaringan air bersih, jaringan jalan raya, listrik, telephone, drainase, tempat pembuangan sampah, saluran pembuangan air kotor, dan gas.
- h. Pada kawasan pemukiman : fasilitas umum yang harus jaringan air bersih, jaringan jalan raya, listrik, telephone, drainase, tempat pembuangan sampah, saluran pembuangan air kotor, gas.
- i. Pada kawasan perdagangan dan jasa : fasilitas umum yang harus tersedia meliputi jaringan air bersih, jaringan jalan raya, listrik, telephone, drainase, tempat pembuangan sampah, saluran pembuangan air kotor, dan fasilitas jalan raya.
- j. Pada kawasan pariwisata fasilitas umum yang tersedia meliputi jaringan air bersih, jaringan jalan raya, listrik, telephone, drainase, tempat pembuangan sampah, dan saluran pembuangan air kotor.

2.5 Klasifikasi Penataan Bangunan Perumahan

Secara umum, klasifikasi fungsional atau penataan kawasan bangunan ditentukan oleh pemerintahan kabupaten tersebut. Di dalam mendukung suatu daerah yang harmonis, perencanaan dalam penataan bangunan harus diutamakan

jalan raya dan drainase, yang mana akan terbentuknya suatu daerah yang rapi dan memanfaatkan suatu lahan kosong untuk membangun tempat bersantai (taman).

2.5.1 Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah

1. Fungsi Utama TPA Sampah TPA sampah berfungsi sebagai penunjang bagi kegiatan penduduk di kawasan budidaya yang mengakibatkan timbulan sampah dari aktivitas manusia. Pemilihan lokasi TPA mengikuti ketentuan (SNI 02-3241-1994 *tentang tatacara pemilihan tempat pembuangan akhir sampah*).
2. Kriteria umum pemilihan lokasi TPA sampah harus mengikuti persyaratan hukum, ketentuan perundang-undangan mengenai pengelolaan lingkungan hidup, AMDL, ketertiban umum, kebersihan kota/lingkungan, peraturan daerah tentang pengelolaan sampah dan perencanaan tata ruang kota serta peraturan-peraturan pelaksanaannya, yakni :
 - a. Operasi dan pemeliharaan TPA sampah mengikuti ketentuan yang berlaku.
 - b. TPA yang digunakan untuk membuang bahan beracun dan berbahaya, lokasinya harus diberi tanda khusus dan tercatat di kantor Pemerintah Daerah.
 - c. Lahan bekas TPA dapat digunakan untuk fungsi lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku.

2.5.2 Halte

1. Fungsi Utama Halte

Fasilitas Halte berfungsi melayani pergerakan masyarakat, baik yang akan meneruskan perjalanan dengan moda angkutan yang sama maupun yang harus berganti moda angkutan lain untuk meneruskan perjalanannya sampai tujuan akhir. Selain itu halte berfungsi pula sebagai tempat pengaturan dan pengawasan pengoperasian kendaraan umum. Utamanya untuk terminal angkutan dari luar kota yang tidak diperkenankan masuk ke dalam kota, halte sebagai bangkitan kegiatan aktivitas manusia berfungsi pula membuka peluang kerja bagi penduduk dikawasan perkotaan dan perdesaan.

2. Kriteria umum pemanfaatan

- a. Penentuan lokasi halte dilakukan berdasarkan rencana jaringan transportasi jalan.
- b. Kegiatan pengelolaan halte dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- c. Di lokasi halte bisa dilakukan kegiatan usaha penunjang, baik oleh badan hukum maupun perorangan.
- d. Pada lokasi halte, fasilitas fisik yang harus tersedia meliputi jaringan listrik, telepon, jaringan jalan raya, tempat pembuangan sampah, drainase, dan saluran air kotor.
- e. Penentuan lokasi halte penumpang maupun barang harus memperhatikan :

- Rencana umum tata ruang.
- Kepadatan lalu lintas dan kapasitas jalan disekitar halte.
- Keterpduan moda transportasi baik intra antar moda.
- Kondisi topografi lokasi terminal.
- Kelestarian lingkungan.

2.6 Klasifikasi Berdasarkan Fungsional

Secara umum, klasifikasi fungsional atau peran dalam penataan suatu daerah di bagi menjadi tiga bagian peran penting dalam penataan daerah yang rapi dan indah, yaitu mebangun jalan raya sebelum bangunan berdiri, membuat lahan hijau sebagai pusat oksigen, membuat taman bermain atau taman kecil sebagai pusat daerah.

2.6.1 Pembuatan Taman

Pembuatan taman atau area bermain dan bersantai masyarakat sangat penting sebagai pelengkap suatu daerah tersebut, dikarenakan taman tempat berkumpulnya masyarakat untuk merefres otak setelah bekerja seharian.

2.7 Klasifikasi Berdasarkan Sperifikasi

Dalam merencanakan suatu geometrik penataan kota para perencana harus benar-benar tahu dan memahami secara jelas untuk penatan suatu daerah seperti yang akan digunakan melakukan klarifikasi penataan kedalam perencanaan, merupakan suatu hal yang sangat penting karena penataan mempunyai hubungan yang erat dengan masyarakat yang bersangkutan.

2.7.1 Perencanaan Pembangunan Wilayah

Dalam pembangunan suatu wilayah perencanaan adalah suatu hal yang utama sebab dengan perencanaan yang tepat akan menimbulkan dampak positif terhadap daerah itu sendiri. Perencanaan yang tepat adalah sebuah perencanaan yang dibuat atas dasar potensi atau keunggulan yang dimiliki daerah itu sendiri. Perencanaan juga akan menjadi bahan dalam membuat sebuah kebijakan pembangunan yang mendukung perencanaan tersebut. Konsep perencanaan wilayah merupakan tindak lanjut dari kegiatan perencanaan yang dilakukan karena adanya perbedaan kepentingan, permasalahan, ciri dan karakteristik dari masing-masing daerah/wilayah yang menurut adanya campur tangan pihak pemerintah pada tingkat wilayah. Perencanaan wilayah dilakukan sebagai upaya untuk mengantisipasi permasalahan di masing-masing wilayah dan mengupayakan keseimbangan pembangunan antar wilayah. Peran utamanya adalah mengatasi secara langsung persoalan-persoalan yang berkenaan pembangunan ditingkat wilayah.

Perencanaan wilayah mencakup pada berbagai segi kehidupan yang komprehensif dan satu sama lain saling bersentuhan, yang semuanya bermuara pada upaya peningkatan kehidupan masyarakat. Berbagai faktor dalam kehidupan seperti ekonomi, politik, dan social serta budaya maupun adat istiadat berbau dalam perencanaan wilayah yang cukup kompleks. Semua faktor harus di pertimbangkan dan diupayakan berjalan seiring bahkan saling mendukung (Miraza, 2010).

Menurut (Arsyad, 1999), fungsi-fungsi perencanaan pembangunan secara umum adalah :

1. Dengan perencanaan diharapkan terdapatnya suatu pengaruh kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksana kegiatan-kegiatan.
2. Dengan perencanaan, dapat dilakukan dengan suatu perkiraan potensi prospek-prospek pengembangan, hambatan, serta resiko yang mungkin di hadapi pada masa yang akan datang.
3. Perencanaan memberikan kesempatan untuk mengadakan pilihan yang terbaik.
4. Dengan perencanaan, dilakukan penyusunan skala prioritas dari segi pentingnya tujuan.
5. Perencanaan sebagai alat untuk mengukur atau standar untuk mengadakan evaluasi.

Nugroho dalam Sirojuzilam (2008) menyatakan bahwa pendekatan bahwa perencanaan regional di titik beratkan pada lokasi dimana kegiatan dilakukan pemerintah daerah mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dan instansi-instansi dipusat dalam melihat aspek ruangan di suatu daerah. Artinya bahwa dengan adanya perbedaan pertumbuhan dan disparitas antar wilayah, maka pendekatan perencanaan perisal adalah sangat penting untuk diperhatikan.

Menurut Arsyad (1999), perencanaan pembangunan ekonomi daerah memiliki beberapa implikasi antara alin :

1. Perencanaan pembangunan ekonomi yang realistis memerlukan pemahaman tentang hubungan antara daerah dengan lingkungan nasional baik horizontal maupun vertical yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan.
2. Sesuatu yang baik secara nasional belum tentu baik untuk daerah dan demikian sebaliknya sesuatu yang baik untuk daerah belum tentu baik secara nasional.
3. Perangkat kelembagaan yang tersedia untuk pembangunan daerah misalnya administrasi, proses pengambilan keputusan, otoritas biasanya sangat berbeda pada tingkat daerah dengan yang tersedia pada tingkat pusat. Selain itu derajat pengendalian kebijakan sangat berbeda pada dua tingkat tersebut. Oleh karena itu, perencanaan daerah yang efektif harus bisa menggunakan sumberdaya-sumberdaya pembangunan sebaik mungkin yang benar-benar dapat dicapai.

2.7.2 Pembangunan Ekonomi Regional

Teori pertumbuhan ekonomi bisa didefinisikan sebagai penjelasan mengenai faktor-faktor apa yang menentukan kenaikan *output* perkapita dalam jangka panjang, dan penjelasan bagaimana faktor-faktor tersebut sehingga terjadi proses pertumbuhan Boedino (1999). Menurut Schumpeter dan Hicks dalam Jhingan (2002). Ada perbedaan dalam istilah perkembangan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Perkembangan ekonomi merupakan spontan dan terputus-putus dalam keadaan stasioner yang senantiasa mengubah dan mengganti situasi keseimbangan

yang ada sebelumnya, sedangkan pertumbuhan ekonomi adalah perubahan jangka secara perlahan dan mantap yang terjadi melalui kenaikan tabungan dan penduduk. Hicks mengemukakan masalah negara terbelakang menyangkut perkembangannya telah cukup dikenal.

Pertumbuhan ekonomi merupakan target utama dalam proses pembangunan wilayah dimana untuk mencapai ini dilakukan perencanaan yang akan diimplementasikan dalam berbagai bentuk kegiatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Jadi perkonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau perkembangan bila hasil dari kegiatan ekonomi di suatu tahun lebih tinggi dari pada tahun sebelumnya, dengan kata lain pertumbuhan dapat tercipta apabila jumlah fisik barang jasa yang di hasilkan dalam kegiatan ekonomi menjadi bertambah besar pada tahun berikutnya, bila terjadi pertumbuhan *output* riil kenaikan pendapatan riil. Definisi pertumbuhan ekonomi yang lain adalah bahwa pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan pendapatan masyarakat secara keseluruhan sebagai cerminan kenaikan seluruh nilai tambah (*value added*) yang tercipta di suatu wilayah.

Todaro dalam Sirojuzilam (2008), mendefinisikan pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bersifat multidimensional, yang melibatkan kepada perubahan besar, baik terhadap perubahan struktur ekonomi, perubahan sosial, mengubah atau menghapus kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi.

Menurut Adisamita (2008), pertumbuhan wilayah (*regional*) merupakan fungsi dari potensi sumberdaya alam, tenaga kerja dan sumberdaya manusia,

investasi modal, prasarana dan pembangunan daerah, kewirausahaan (kewiraswastaan), kelembagaan daerah dan lingkungan pembangunan secara luas.

2.7.3 Pertumbuhan Ekonomi Regional

Pertumbuhan ekonomi dapat dinilai sebagai dampak kebijaksanaan pemerintah, khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat pertumbuhan yang terjadi sebagai indikator penting bagi daerah untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan (Sirojuzilam,2008).

Perekonomian suatu daerah dikatakan mengalami pertumbuhan atau perkembangan bila hasil dari kegiatan ekonomi disuatu tahun lebih tinggi dari pada tahun sebelumnya, dengan kata lain pertumbuhan dapat tercipta apabila jumlah fisik barang jasa yang di dihasilkan dalam kegiatan ekonomi menjadi bertambah besar pada tahun berikutnya.

Perhatian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah semakin meningkat dalam erat ekonomi daerah. Hal ini cukup logis, karena dalam era otonomi daerah masing-masing daerah berlomba-lomba meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya, guna meningkat kemakmuran masyarakat. Oleh karena itu, pembahasan tentang struktur dan faktor penentu pertumbuhan daerah akan sangat penting artinya bagi pemerintah daerah dalam menentukan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mendorong ekomomi daerahnya (Sjafizal,2008).

Pada pembangunan daerah dan sistem perencanaan yang selama ini cenderung seragam dikarenakan sistem yang sentralisasi di mana setiap kebijakan pembangunan yang dilakukan selalu berasal dari satu arah yakni *top-down*, telah berubah menjadi lebih bervariasi tergantung pada potensi dan permasalahan pokok yang dihadapi di daerah hal ini diakibatkan oleh perubahan sistem pemerintah yang sangat mempengaruhi penerapan kebijakan di daerah. Kondisi ini juga memicu persaingan antara daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi daerah akan lebih cepat apabila memiliki keuntungan *absolute* kaya akan sumberdaya alam dan memiliki keuntungan komparatif apabila daerah tersebut lebih efisien dari daerah lain dalam melakukan kegiatan produksi dan perdagangan (Sirojuzilam,2008).

Dalam hal ini, daerah dan kabupaten kota bisa mengambil peran mendorong perekonomiannya dengan memanfaatkan sumber daya ekonomi di daerah (sumber daya local) berdasarkan konsep local dan wilayah. Tiap daerah atau wilayah mempunyai potensi local yang berbeda. Dari potensi local inilah daerah/wilayah menggerakkan perekonomiannya, khususnya dari sudut keunggulan yang dimiliki (Miraza, 2010).

Identifikasi sektor dan sub sektor yang dapat menunjukkan keunggulan komparatif daerah merupakan tugas utama pemerintah daerah sebab dengan mengetahui sektor yang menjadi unggulan akan menjadi dasar dalam menetapkan kebijakan yang tepat oleh pemerintah daerah.

2.8 Konsep dan Pengertian Sektor Unggulan

Pengertian sektor unggulan pada dasarnya dikaitkan dengan suatu bentuk perbandingan, baik itu perbandingan berskala internasional, regional, maupun nasional, pada lingkungan internasional, suatu sektor dikatakan unggul jika sektor tersebut mampu bersaing dengan sektor yang sama dengan negara lain. Sedangkan pada lingkup nasional, suatu sektor dapat dikategorikan sebagai sektor unggulan apabila sektor di wilayah tertentu mampu bersaing dengan sektor yang sama dihasilkan oleh wilayah lain, baik dipasar nasional ataupun domestik.

Menurut Tumenggung (1996) member batasan bahwa sektor unggulan adalah sektor yang memiliki keunggulan komparatif (*comprative advantages*) dengan produk sektor sejenis dengan daerah lain serta mampu memberikan nilai manfaat yang lebih besar. Sedangkan Mawardi (1997) mengartikan sektor unggulan adalah sektor yang memiliki nilai tambahan yang besar terhadap perekonomian lain, serta memiliki permintaan yang tinggi, baik pasar local maupun pasar ekspor.

Menurut Rachbini (2001) ada empat syarat agar suatu sektor tertentu menjadi sektor prioritas, yakni :

1. Sektor tersebut harus menghasilkan produk yang mempunyai permintaan yang cukup besar, sehingga laju pertumbuhan berkembang cepat akibat dari efek permintaan tersebut.
2. Karena perubahan energi yang teradopsi secara kreatif, maka fungsi produksi baru bergeser dengan pengembangan kapasitas yang lebihluas.

3. Harus terjadi peningkatan investasi kembali dari hasil-hasil produksi sektor yang menjadi prioritas tersebut, baik swasta maupun pemerintah.
4. Sektor tersebut harus berkembang, sehingga mampu memberi pengaruh terhadap sektor-sektor lainnya.

Data PDRB merupakan informasi yang sangat penting untuk mengetahui *output* pada sektor ekonomi dan melihat pertumbuhan disuatu wilayah tertentu (provinsi/kabupaten/kota). Dengan bantuan data DPRB, maka di tentukannya sektor unggulan (*leading sector*) di suatu daerah/wilayah.

Sektor unggulan adalah satu grup sektor/subsektor yang mampu mendorong kegiatan ekonomi dan menciptakan kesejahteraan di suatu daerah terutama melalui produksi, ekspor dan penciptaan lapangan pekerjaan, sehingga identifikasi sektor unggulan sangat penting terutama dalam rangka menentukan prioritas dan perencanaan pembangunan ekonomi di daerah.

Perencanaa adalah sebagai upaya untuk mengantisipasi ketidakseimbangan yang terjadi yang bersifat akumulatif. Artinya perubahan pada suatu keseimbangan awal dapat mengakibatkan perubahan pada sistem social yang akhirnya membawa sistem yang ada menjauhi keseimbangan awal. Perencanaan sebagai dari pada fungsi manajemen yang bila ditempatkan pada pembangunan daerah akan berperan sebagai arahan bagi proses pembangunan berjalan menuju tujuan disamping itu menjadi tolak ukur keberhasilan proses pengambilan yang dilaksanakan.

Menurut Tjokroamidjojo (1992), perencanaan dalam arti seluas-luasnya tidak lain adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang

akan dilakukan untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif.

Albert Waterston mendefinisikan perencanaan pembangunan yaitu melihat kedepan dengan mengambil pilihan berbagai alternative dari kegiatan untuk mencapai tujuan masa depan tersebut dengan terus mengikuti supaya pelaksanaan tidak menyimpang tujuan. Berbagai ahli memberikan definisi perencanaan bahkan ada yang memberikan pengertian lebih luas contohnya Prof. Jan Tinbergen mengemukakan lebih kepada kebijaksanaan pembangunan (*development policy*) bukan hanya perencanaan (*plans*) bukan hanya perencanaan (*plans*) semata.

2.9 Sarana Kesehatan

2.9.1 Deskripsi Umum

Sarana kesehatan berfungsi memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat sekaligus untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Dasar penyediaan sarana ini adalah didasarkan jumlah penduduk yang dilayani oleh sarana tersebut.

Dasar penyediaan ini juga akan mempertimbangkan pendekatan desain keruangan unit-unit atau kelompok lingkungan yang ada. Tentunya hal ini dapat terkait dengan bentuk grup bangunan/balok yang nantinya terbentuk sesuai konteks lingkungannya. Sedangkan penempatan penyediaan fasilitas ini akan

mempertimbangkan jangkauan radius area layanan terkait dengan kebutuhan dasar sarana yang harus dipenuhi untuk melayani pada area tertentu.

2.9.2 Jenis sarana

Beberapa jenis sarana yang dibutuhkan adalah :

1. Posyandu yang berfungsi memberikan pelayanan kesehatan untuk anak-anak usia balita;
2. Balai pengobatan warga yang berfungsi memberikan pelayanan penduduk dalam bidang kesehatan dengan titik berat terletak pada penyembuhan (*curative*) tanpa perawatan, berobat dan pada waktu-waktu tertentu juga untuk vaksinasi;
3. Balai kesejahteraan ibu dan anak (BKIA/klinik bersalin), yang berfungsi melayani ibu baik sebelum, pada saat dan sesudah melahirkan serta melayani anak usia sampai dengan 6 tahun;
4. Puskesmas dan balai pengobatan, yang berfungsi sebagai sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memberikan pelayanan kepada penduduk dalam penyembuhan penyakit, selain melaksanakan program pemeliharaan kesehatan pencegahan penyakit di wilayah kerjanya;
5. Puskesmas pembantu dan balai pengobatan, yang berfungsi sebagai unit pelayanan kesehatan terbatas dan membantu pelaksanaan kegiatan puskesmas dalam lingkup wilayah yang lebih kecil; dan
6. Tempat praktek dokter, merupakan salah satu sarana yang memberikan pelayanan kesehatan secara individual dan lebih dititik beratkan pada

usaha penyembuhan tanpa perawatan; dan apotik, berfungsi untuk melayani penduduk dalam pengadaan obat-obatan, baik untuk penyembuhan maupun pencegahan.

Tabel 2.2 Kebutuhan Sarana Kesehatan

No	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk Pendukung (Jiwa)	Kebutuhan Per satuan sarana		Standar (m ² /Jiwa)	Kriteria		Keterangan
			Luas lantai min. (m ²)	Luas lahan min (m ²)		Radius Pencapaian	Lokasi data Penyelesaian.	
1	Posyandu	1.250	36	60	0,048	500	Ditengah kelompok tetangga tidak menyebrang jalan raya	Dapat bergabung dengan balai warga atau sarana hunian/rumah
2	Balai Pengobatan Warga	2.500	150	300	0,12	1.000 m ²	Ditengah kelompok tetangga tidak menyebrang jalan raya.	Dapat bergabung dalam lokasi balai warga
3	BKI A/ klinik	30.000	1.500	3.000	0,1	4.000 m ²	Dapat dijangkau dengan	

	bersalin						kendaraan umum	
4	Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	30.000	150	300	0,006	1.500 m ²	-idem-	Dapat bergabung dalam lokasi kantor lokasi
5	Puskesmas dan Balai Pengobatan	120.000	420	1.000	0,008	3.000 m ²	-idem-	Dapat bergabung dalam lokasi kantor kecamatan
6	Tempat praktiker dokter	5.000	18	-	-	1.500 m ²	-idem-	Dapat bersatu dengan rumah tinggal/tempat usaha/apotik
7	Apotik/rumah obat	30.000	120	250	0,025	1.500 m ²	-idem-	

2.10 Sarana Perdagangan dan Niaga

2.10.1 Deskripsi Umum

Sarana perdagangan niaga ini tidak selalu berdiri dan terpisah dengan bangunan sarana yang lain. Dasar penyediaan selain berdasarkan jumlah penduduk yang akan dialaminya, juga mempertimbangkan pendekatan desain keruangan unit-

unit atau kelompok lingkungan yang ada. Tentunya hal ini dapat terkait dengan bentukan grup bangunan/blok yang nantinya terbentuk sesuai konteks lingkungannya. Sedangkan penempatan penyediaan fasilitas ini akan mempertimbangkan jangkauan radius area layanan terkait dengan kebutuhan dasar sarana yang harus dipenuhi untuk melayani pada area tertentu.

2.10.2 Jasa sarana

Menurut skala pelayanan, penggolongan jenis sarana perdagangan dan niaga adalah :

1. Toko/warung (skala pelayanan unit RT = 250 penduduk), yang menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari ;
2. Pertokoan (skala pelayanan 6.00 penduduk), yang menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari yang lebih lengkap dan pelayanan jasa seperti wartel, fotocopy, dan sebagainya.
3. Pusat pertokoan dan atau pasar lingkungan (skala pelayanan unit kelurahan = 30.000 penduduk), yang menjual keperluan sehari-hari termasuk sayur, daging, ikan, buah-buahan, beras, tepung, pakaian, barang-barang kelontong, alat-alat pendidikan, alat-alat rumah tangga, serta pelayanan jasa seperti wartel dan sebagainya.
4. Pusat pembelanjaan dan niaga (skala pelayanan unit kecamatan = 120.000 penduduk), yang selain menjual kebutuhan sehari-hari, pakaian, barang kelontong, elektronik, juga untuk pelayanan jasa perbengkelan, reparasi, unit-unit produksi yang tidak menimbulkan polusi, tempat

hiburan serta kegiatan niaga lainnya seperti kantor-kantor, bank, industri kecil dan lain-lain.

2.10.3 Kebutuhan Ruang dan Lahan

Kebutuhan ruang dan lahan untuk sarana ini akan berkaitan juga dengan daya dukung lingkungan dan jalan yang ada disekitar bangunan sarana tersebut. Besaran kebutuhan ruang dan lahan menurut penggolongan jenis sarana perdagangan dan niaga adalah :

1. Warung /toko

Luas lantai yang dibutuhkan ± 50 m² termasuk gudang kecil. Apabila merupakan bangunan tersendiri (tidak bersatu dengan rumah tinggal), luas tanah yang dibutuhkan adalah 100 m².

2. Pertokoan (skala pelayanan 6.000 penduduk).

Luas lantai yang dibutuhkan 1.200 m². Sedangkan luas tanah yang dibutuhkan 3.000 m². Bangunan pertokoan ini harus dilengkapi dengan:

a. Tempat parkir kendaraan umum yang dapat dipakai bersama kegiatan lain pada pusat lingkungan ;

b. Sarana-sarana lain yang erat kaitannya dengan kegiatan warga.

3. Pusat perbelanjaan dan niaga (skala pelayanan unit kelurahan = 120.000 penduduk) luas tanah yang dibutuhkan adalah 36.000 m². Bangunan pusat perbelanjaan harus dilengkapi :

1	Toko/ warun g	250 cf	50 (termasu k gedung)	100 (bila berdiri sendiri)	0,4	300 m'	Ditengah kelompo k tetangga dapat merupak an bagian dari sarana lain.
2	Pertok oan	6.000	1.200	3.000	0,5	2.000 m'	Dipusat kegiatan sub lingkung an. KDB 40% dapat berbentu k P&D
3	Pusat pertok oan + pasar lingku ngan	30.000	13.500	10.000	0,33		Dapat dijangka u dengan kendaraa n umum
4	Pusat perbel anjaan dan niaga (toko +pasa r+ban k+kan tor)	120.000	36.000	36.000	0,3		Terletak dijalan utama. Termasu k sarana parkir sesuai ketentua n setempat

sumber : SNI 03-1733-1989, Tata cara perencanaan kawasan perumahan kota

2.11 Sarana Pendidikan dan Pembelajaran

2.11.1 Deskripsi Umum

Dasar penyediaan sarana pendidikan adalah untuk melayani setiap unit administrasi pemerintahan baik yang informal (RT, RW) maupun yang formal (Kelurahan, Kecamatan), dan bukan didasarkan semata-mata pada jumlah penduduk yang akan dilayani oleh sarana tersebut.

Dasar penyediaan sarana pendidikan ini juga mempertimbangkan pendekatan desain keruangan unit-unit atau kelompok lingkungan yang ada. Tentunya hal ini dapat terkait dengan bentukan grup bangunan/blok yang nantinya terbentuk sesuai konteks lingkungannya. Sedangkan penempatan penyediaan fasilitas ini akan mempertimbangkan jangkauan radius area layanan terkait dengan kebutuhan dasar sarana yang harus dipenuhi untuk melayani pada area tertentu. Perencanaan sarana pendidikan harus didasarkan pada tujuan pendidikan yang akan dicapai, dimana sarana pendidikan dan pembelajaran ini akan menyediakan ruang belajar harus memungkinkan siswa untuk dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, serta sikap secara optimal. Oleh karena itu dalam merencanakan sarana pendidikan harus memperhatikan :

1. Berapa jumlah anak yang memerlukan fasilitas ini pada area perencanaan.
2. Optimasi daya tampung dengan satu *shift*.
3. Effisiensi dan efektifitas kemungkinan pemakaian ruang belajar secara terpadu.
4. Pemakaian sarana dan prasaran pendukung.

5. Keserasian dan keselarasan dengan konteks setempat terutama dengan beberapa jenis sarana lingkungan lainnya.

2.11.2 Jenis Sarana

Sarana pendidikan yang diuraikan dalam standar ini hanya menyangkut bidang pendidikan yang bersifat formal/umum, yaitu meliputi tingkat prabelajar (Taman kanak-kanak); tingkat dasar (SD/MI); tingkat menengah (SLTP/MTs dan SMU).

1. Taman kanak-kanak (TK), yang merupakan penyelenggaraan kegiatan belajar dan mengajar pada tingkatan pra belajar dengan lebih menekankan pada kegiatan bermain, yaitu 75%, selebihnya bersifat pengenalan;
2. Sekolah dasar (SD), yang merupakan bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program enam tahun.
3. Sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP), yang merupakan bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program tiga tahun sesudah sekolah dasar (SD).
4. Sarana pembelajaran lain yang dapat berupa taman bacaan ataupun perpustakaan umum lingkungan, yang dibutuhkan suatu lingkungan perumahan sebagai sarana untuk meningkatkan minat membaca, menambah ilmu pengetahuan, rekreasi serta sarana penunjang pendidikan.

2.11.3 Kebutuhan Ruang dan Lahan

Berbagai pertimbangan yang harus diperhatikan pada penentuan kebutuhan ruang dan lahan adalah.

1. Penyediaan jumlah sarana pendidikan dan pembelajaran yang harus disediakan didasarkan pada Tabel 9.
2. Kebutuhan sarana pendidikan pembelajar serta pendidikan tingkat dasar dan menengah, harus direncanakan berdasarkan perhitungan proyeksi jumlah siswa dengan cara sebagaimana Rumus 2, Rumus 3, Rumus 4 dan Rumus 5, yang akan menentukan tipe sekolah serta kebutuhan jumlah ruang, luas ruang dan luas lahan. Rumus 2, Rumus 3, Rumus 4 dan Rumus 5, dipergunakan juga untuk menghitung penambahan ruang-ruang belajar pada sekolah-sekolah yang sudah ada.
3. Perencanaan kebutuhan ruang dan lahan untuk sarana pendidikan didasarkan tipe masing-masing sekolah yang dibedakan menurut:
 - a. Jumlah rombongan belajar.
 - b. Jumlah peserta didik.
 - c. Jumlah tenaga kependidikan; kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, dan tenaga tata usaha.
 - d. Luas tanah, dan lingkungan/lokasi sekolah.
4. Kebutuhan luas lantai dan lahan untuk masing-masing sarana pendidikan tergantung pada tipe sekolah untuk masing-masing tingkatan pendidikan. Untuk perencanaan bangunan SMU, mengacu pada SNI-03-1730-2002 tentang tata cara perencanaan bangunan gedung

sekolah menengah umum. Dasar penyediaan ini juga akan mempertimbangkan pendekatan desain keruangan unit-unit atau kelompok lingkungan yang ada beserta posisi pusat lingkungan yang ada. Tentunya hal ini dapat terkait dengan bentukan grup bangunan/balok yang nantinya lahir sesuai konteks lingkungannya.

Tabel 2.4 Jenis Sarana Pendidikan

No	Jenis Sarana	Program Ruang
1	TK	Memiliki min 2 ruang kelas @25-30 murid serta ruang-ruang lainnya.
2	SD	Memiliki 6 ruang kelas @40 murid
3	SMP	Memiliki 6 ruang kelas @40 murid
5	Taman Baca	Memiliki min 1 ruang baca

SUMBER :SNI 03-1733-1989, Tata cara perencanaan kawasan perumahan kota.

2.12 Metode Yang Digunakan

2.12.1 Metode Scoring System

Scoring system disebut juga sebagai skor skala, memerlukan suatu norma pembandingan agar dapat di interpretasikan secara kualitatif. Pada dasarnya interpretasi skor skala selalu bersifat normative, artinya makna skor diacukan pada posisi relatif skor dalam suatu kelompok yang telah dibatasi terlebih dahulu. Untuk

mengukur diri serta mengevaluasi diri terhadap materi kajian ilmu tasawuf yang diberikan oleh guru mursyid, maka proses selanjutnya untuk menentukan kategorisasi didalam suatu kelompok ini dengan skala prioritas jenjang (ordinal) menggunakan metode scoring system. Kategori jenjang (ordinal) menurut Saifuddin Azwar (2003:107) kategori ini memiliki tujuan menempatkan individu ke dalam kelompok-kelompok terpisah secara berjenjang menurut suatu kontinum berdasar atribut yang diukur. Kontinum jenjang ini contohnya adalah dari rendah ke tinggi, dari paling jelek ke paling baik, dari sangat tidak puas ke sangat puas, dan sebagainya. Banyaknya jenjang kategori diagnosis yang akan dibuat biasanya tidak lebih dari lima jenjang tetapi juga tidak kurang dari tiga jenjang. Misalnya mengelompokkan individu-individu kedalam hanya dua jenjang diagnosis saja, yaitu “semangat kerja rendah” dan “semangat kerja tinggi” akan mengakibatkan resiko kesalahan yang cukup besar bagi skor-skor yang terletak disekitar mean kelompok.

1. Membuat Hipotesis Penilaian

Nilai kolerasi r berkisar antara $-1 < r < 1$ berarti terdapat kolerasi antar variabel atau mempunyai hubungan yang signifikan.

2. Membuat tabel pembantu

X1 = Faktor Sarana dan Prasarana

X2 = Faktor Pembangunan

X3 = Faktor Aset-Aset Perumahan.

3. Menghitung nilai pengaruh sarana prasarana (X_1) terhadap pengembangan pusat aset-aset daerah.

2.12.2 Metode Slovin

Metode Slovin adalah Suatu sistem matematis yang digunakan untuk menghitung jumlah dari sebuah populasi objek tertentu yang belum diketahui karakteristiknya secara pasti. Rumus ini diperkenalkan pertama kali oleh seorang Ilmuwan Matematis yang bernama *Slovin*, pada tahun 1960. Rumus Slovin ini biasa digunakan untuk sebuah penelitian pada suatu objek tertentu dalam jumlah populasi yang besar, sehingga digunakanlah untuk meneliti pada sebuah sampel dari populasi objek yang besar tersebut.

Rumus populasi dan sample menurut **Slovin** (dalam Didwan. 2005;65)

$$n = N / (1 + N.e^2)$$

n = **Number Of Samples** (jumlah sampel)

N = **Total Population** (jumlah anggota populasi)

E = **Error tolernce** (toleransi terjadinya gulat; taraf signifikansi)

2.12.3 Metode SPSS

SPSS adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan analisis statistika tingkat lanjut, analisis data dengan algoritma machine learning, analisis string, serta analisis big data yang dapat diintegrasikan untuk membangun platform data

analisis. SPSS adalah kependekan dari Statistical Package for the Social Sciences. SPSS sangat populer di kalangan peneliti dan statistikawan untuk membantu melakukan perhitungan terkait analisis data. SPSS menyediakan library untuk perhitungan statistika dengan antarmuka interaktif yang menjadikannya sebagai software analisis data tingkat lanjut paling populer di berbagai universitas, instansi, dan perusahaan.